

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pengelolaan keuangan anggaran belanja pembangunan pada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, yang telah dilakukan mulai dari prosedur penyusunan, rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penyusunan anggaran belanja pembangunan sektor pariwisata:
 - a. Tiap-tiap instansi membahas seluruh rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi yang terkait selama satu tahun ke depan. Rencana kegiatan yang telah tersusun tersebut terangkum dalam suatu Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
 - b. RASK yang telah dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran Eksekutif dan DPRD kemudian dijabarkan menjadi Perda APBD yang berisi mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja proyek.
 - c. Dengan berpedoman pada Perda APBD, masing-masing instansi kemudian membuat Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang berisi tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang dan juga disertai dengan penjabaran rencana anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan.

d. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah didokumenkan dalam DASK tersebut, maka dilakukan evaluasi tiap-tiap program kerja.

2. Realisasi dan penggunaan anggaran belanja pembangunan pada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2004 dan 2005 jika dilihat dari variance penyimpangan antara rencana anggaran belanja terhadap realisasi proyeknya maka dapat dinyatakan efisien.
3. Pengelolaan keuangan khususnya anggaran belanja pembangunan sektor pariwisata kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. Mulai dari prosedur penyusunan RABPD sampai pada realisasi anggaran tidak terjadi pembengkakan anggaran dan seluruh proyek dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

5.1. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu saja ada keterbatasan yang tidak mampu dihindari, antara lain:

1. Keterbatasan ruang lingkup penelitian, maksudnya kesimpulan yang diberikan hanya didasarkan pada data yang diperoleh.

2. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta tidak bersedia memberikan data mengenai rincian biaya untuk rencana dan realisasi proyek, sehingga peneliti tidak dapat memberikan uraian mengenai pengeluaran untuk setiap proyek secara rinci.
3. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta menggunakan jenis anggaran *line-item budgeting* yang penetapannya melalui pendekatan *incremental* atau dengan kata lain, menggunakan jenis anggaran tersebut Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta selalu dapat melakukan revisi selama tahun berjalan. Oleh karena itu dengan adanya keterbatasan tersebut, maka penulis menggunakan asumsi bahwa penyusunan anggaran dari Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta telah dilakukan dengan baik dan telah disesuaikan dengan kondisi yang nyata.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Penggantian jenis anggaran dari *line item budgeting* menjadi *performance budgeting*. *Line-item budgeting* memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat menyebabkan anggaran yang disusun oleh pemerintah selalu tampak baik. Padahal jenis anggaran ini penetapannya dilakukan melalui pendekatan *incremental*, dimana

dimungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan revisi selama tahun berjalan. Meskipun mudah dalam penyusunannya, namun dengan menggunakan anggaran jenis ini tidak dapat dilakukan analisis yang mendalam tentang tingkat keberhasilan setiap program. Sehingga akibatnya tidak tersedianya informasi yang logis dan rasional tentang rencana alokasi anggaran tahun yang akan datang. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah untuk mulai mengganti jenis anggarannya menjadi *performance budgeting*. Karena dengan menggunakan *performance budgeting*, pemerintah dapat mengalokasikan dananya secara optimal yang didasarkan pada efisiensi unit kerja. Selain itu, didalam *performance budgeting* juga sudah mencakup tolok ukur kinerja (efisiensi dan efektivitas) sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Proses yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengganti jenis anggaran dari *line-item budgeting* menjadi *performance budgeting* tidak dapat dilaksanakan sekaligus, melainkan harus dilaksanakan secara bertahap, terus-menerus, dan berkesinambungan. Untuk dapat mencapainya, pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada instansi-instansi terkait yang berada dibawahnya. Selain itu perlu juga dilakukan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia yang nantinya akan berhubungan secara langsung dengan penyusunan anggaran. Apabila semua pihak yang terkait telah siap, maka pemerintah dapat mulai menerapkan jenis anggaran yang baru tersebut, sehingga pada akhirnya pemerintah akan

dapat menyusun anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, termasuk kepada masyarakat.

2. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta sebaiknya lebih banyak melakukan proyek-proyek yang dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara karena selama ini pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta lebih banyak berorientasi kepada wisatawan lokal dan belum bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Djoefri, 1984, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana.
- Astuti, Sri dan Yulita, Lita, 2003, *Buletin Ekonomi: Implementasi Otonomi Daerah Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*, 1(1), 17-25.
- Badan Pusat Statistik, 2005, *Kota Yogyakarta Dalam Angka*, Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, 1995, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia Edisi III*, Yogyakarta, BPFE.
- Budiyuwono, Nugroho, 2000, *Pengantar Statistik Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta, UGM.
- Devas, Nick dan Binder, Brian, 1987, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Jakarta, Salemba Empat.
- Kompas, 2001, *Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 1*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Mamesah, D. J., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Munandar, M., 1980, *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Yogyakarta, BPFE.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1857
4512/54

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5356 Tanggal : 19/10/2006
- Meningat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijinkan Kepada : Nama : MICHAL CHRISTIANI. S NO MHS / NIM : 14168/EA
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Babarsari No.43 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ch. Heni Kurniawan, SE, M.Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DARI SUDUT
PANDANG RENCANA ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN REALISASINYA PADA SEKTOR PARIWISATA
- Isi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19/10/2006 Sampai 19/01/2007
Materi : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Syarat Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MICHAL CHRISTIANI. S

Diusulkan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Dinas Parnasibud Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 04/11/2006

Kepala Dinas Perizinan Kota



Dra. MK. PONTJOSIWI. W
NIP 010165621